



► TATA KELOLA PEMERINTAHAN

## Pengelolaan Aset Desa di DIY Jadi Contoh Jawa Barat

DANUREJAN—Pengelolaan aset desa yang digunakan sebagai sarana pendidikan SMA dan SMK negeri di DIY menjadi pembelajaran DPRD Provinsi Jawa Barat dalam agenda studi banding di DPRD DIY, Senin (16/6).

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan jajarannya perlu belajar dari Pemda DIY yang dinilai mampu mengelola aset desa dengan regulasi dan mekanisme yang lebih tertata. Sementara, persoalan aset desa di Jawa Barat terbilang kompleks, karena puluhan sekolah berdiri di atas tanah milik desa tanpa skema yang jelas.

"Kami perlu belajar dari berbagai praktik yang baik di DIY, karena persoalan aset desa yang digunakan untuk sekolah negeri sudah menjadi isu yang cukup lama dan belum sepenuhnya terselesaikan di Jawa Barat," ujar Rahmat, Rabu (18/6).

Rahmat mengungkapkan, saat ini terdapat 97 sekolah negeri di Jawa Barat yang berdiri di atas tanah desa. Namun, kebanyakan belum memiliki status hukum yang jelas baik dalam bentuk sewa, hibah, atau tukar menukar aset.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Aslam Ridlo, mengatakan DIY pernah mengalami permasalahan serupa, meskipun dengan skala berbeda. Namun, yang membedakan DIY memiliki pendekatan penyelesaian yang disesuaikan dengan karakteristik keistimewaan daerah. "Kami juga mengalami masa transisi kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Namun, DIY bisa menyusun kebijakan dan pendekatan yang relatif fleksibel terhadap aset desa berkat keistimewaan yang kami miliki," kata Aslam.

Menurut Aslam, keberadaan Dana Keistimewaan (Danais) berdampak terhadap fleksibilitas dalam pengelolaan aset desa di DIY. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah mendukung kegiatan pendidikan dan pengelolaan pertahanan secara lebih mandiri. "Dengan Danais, kami punya keleluasaan untuk mengatur tata ruang dan pertahanan secara lebih menyeluruh, termasuk mendukung kebutuhan pendidikan dan pembebasan lahan. Ini salah satu keunggulan fiskal yang membuat kami lebih leluasa membuat kebijakan," katanya.

Dia mencontohkan skema kerja sama yang diterapkan SMK Negeri 1 Pleret, Bantul. Aslam mengatakan sekolah tersebut menggunakan tanah kas desa melalui mekanisme sewa dan diperbolehkan oleh peraturan desa. "Bahkan sudah mengatur tarif sosial bagi kegiatan pendidikan. Ini menjadi *win-win solution* karena tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan, dan desa juga mendapat kepastian manfaat ekonominya," katanya.

Aslam mengatakan DPRD DIY bersedia memfasilitasi menyampaikan informasi dari instansi terkait kepada DPRD Jawa Barat. Pihaknya mendukung Jawa Barat agar bisa menyusun skema dan merumuskan kebijakan yang tepat. (Ariq Fajar Hidayat)